



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN NITA

Jalan Don Silipi No. --- (0382) 21469 Kode Pos : 861152

---

KEPUTUSAN CAMAT NITA

NOMOR: 6 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) DAHLIA NPL0 DESA WULIWUTIK KECAMATAN NITA

TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Kanak - kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi Anak Usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar pencapaian bagi Pendidikan Pemula;
  - b. bahwa Pos PAUD Dahlia Nilo, Desa Wuliwutik Kecamatan Nita telah menyelenggarakan pelayanan bagi anak Paud sejak tahun 2016 dan sesuai Keputusan Kepala Desa Wuliwutik tentang Pendirian Pos PAUD Nomor 15 /SK/2017 tanggal 15 Agustus 2017;
  - c. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan maka Pos PAUD Dahlia Nilo Kecamatan Nita, telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional, sesuai Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014. Tentang Pendirian Satuan Paud ( Pasal 21 ayat 3 ) ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Nita tentang Pos PAUD Dahlia Desa Wuliwutik Kecamatan Nita;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, NTB, NTT ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomr 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  10. Peraturan Pemerintah Nomr 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah DaerahPropinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomr 47 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  12. Peraturan Pemerintah Nomr 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  13. Peraturan Pemerintah Nomr 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  14. Peraturan Pemerintah Nomr 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembahan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lengkap : Pos PAUD Dahlia Nilo Deswa Wuliwutik  
Alamat : Dusun Nilo,  
Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka  
Desa : Wuliwutik  
Kecamatan : Nita  
Kabupaten : Sikka  
Nama Pengelola : Margareth Demetriana

KEDUA

: Pemegang izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

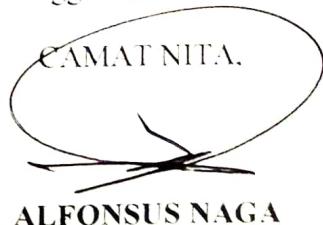
1. Menyelenggarakan kegiatan Pos PAUD sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;
3. Laporan berkala tentang kegiatan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Kantor Camat Nita dan tembusannya disampaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Nita

Pada tanggal 13 Maret 2023

CAMAT NITA,  
  
ALFONSUS NAGA